

**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF RECOGNITION OF INCOME AND EXPENSE BASED ON INDONESIAN
ACCOUNTING STANDARDS FOR NON-PUBLICLY-ACCOUNTABLE ENTITIES IN THE
COOPERATIVE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DEPARTMENT OF EDUCATION IN NORTH
SULAWESI PROVINCE*

Oleh:
Ribka Olivia Kawatu¹
Ventje Ilat²
Anneke Wangkar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹ ribkalivia@gmail.com

² ventje_ilat@unsrat.ac.id

³ annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak : Standar akuntansi yang digunakan koperasi dalam menyusun laporan keuangan adalah SAK ETAP. Pendapatan dan beban merupakan komponen yang penting dalam laporan keuangan. Perbedaan dalam penyajian pendapatan dan beban akan berpengaruh dalam laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengakui pendapatan dan beban secara *cash basis* yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat kas dan setara kas telah diterima atau dikeluarkan oleh koperasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan SAK ETAP. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan berpedoman pada SAK ETAP dalam pengakuan pendapatan dan beban agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

Kata kunci : pengakuan pendapatan, pengakuan beban, sak etap

Abstract : The accounting standards used by the cooperative in preparing financial statements are SAK ETAP. Income and expenses are an important component of financial statements. Differences in the presentation of income and expenses will affect the financial statements. The purpose of this study was to find out how the recognition of income and expenses in KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara and its suitability with SAK ETAP. The research method used is descriptive qualitative. Data collection methods are interviews and documentation. The results showed that KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara recognized revenue and expenses using the cash base method, namely income and expenses are recognized when cash and cash equivalents have been received or issued by the cooperative. From the results of the study it can be concluded that the recognition of the income and expenses of the KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara is not in accordance with SAK ETAP. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara is expected to be guided by SAK ETAP in recognizing income and expenses in order to generate reasonable financial reports.

Keywords : revenue recognition, expense recognition, sak etap

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha kreatif yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat memerangi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. UMKM juga dapat memberikan pemasukan bagi negara melalui devisa. Dalam perkembangannya di Indonesia, UMKM telah sangat berkembang dan sangat banyak jenis dan bentuk usahanya.

Koperasi merupakan bagian dari UMKM. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi sebagai salah satu jenis badan usaha kecil menengah, dalam menyusun laporan keuangan hendaknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) seiring dengan telah cabutnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 27 yang sebelumnya merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh badan usaha koperasi dalam menyusun laporan keuangan, sesuai dengan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8 tanggal 10 November 2014.

KPRI merupakan koperasi yang beranggotakan aparatur sipil negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan koperasi yang beranggotakan aparatur sipil negara dalam lingkup Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. KPRI berdiri sah dengan Badan Hukum 1970/BH/V tanggal 31 Oktober 1975. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan memiliki anggota sebanyak 1.246 sampai tahun 2017 dengan 744 anggota aktif dan 502 anggota pasif. Berdasarkan Rapat Anggota Tahun (RAT) tahun 2017, KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya menyusun 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi.

Laporan laba rugi untuk koperasi dikenal dengan istilah Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU). Komponen penting dalam menghitung sisa hasil usaha adalah pendapatan dan beban. Sisa hasil usaha disusun berdasarkan besarnya pendapatan dan beban periode tersebut. Tujuan utama dari pengakuan pendapatan dan beban adalah untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dan biaya diakui sebagai beban. Ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu *accrual basis* dan *cash basis*. *Accrual basis* adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas diterima. Pengakuan pendapatan dan beban pada periode yang bersangkutan dalam laporan keuangan sangatlah penting untuk kewajaran laporan keuangan. Penggunaan metode yang tidak sesuai akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh pada periode yang bersangkutan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penganalisisan data-data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2016 : 2), akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai. Kegiatan akuntansi diawali dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam jurnal dan kemudian memasukkan catatan tersebut ke dalam masing-masing rekening buku besar (*posting*). Setelah itu diadakan ringkasan terhadap data-data pada buku besar dan kegiatan akuntansi akan berakhir dengan penyajian laporan keuangan.

Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2019 : 2.22), pengertian pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Definisi pendapatan menurut FASB yang dikutip oleh Harahap (2011 : 244) adalah arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberi jasa atas pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Pendapatan merupakan komponen penting

dalam operasi perusahaan karena, pendapatan berpengaruh langsung terhadap laba yang diharapkan untuk menjamin keberlangsungan usaha perusahaan.

Sumber dan Jenis Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019 : 20.1) dalam SAK ETAP, pendapatan bersumber dari :

1. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
2. Pemberian jasa;
3. Kontrak konstruksi;
4. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.
5. Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain berikut ini :
 - a. perjanjian sewa;
 - b. dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas;
 - c. perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu, atau pelepasannya.

Kaitannya dengan operasi perusahaan, pada umumnya sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan terdiri atas:

1. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang timbul dari hasil kegiatan-kegiatan usaha normal perusahaan, baik dari hasil barang dagangan, maupun penyerahan jasa.
2. Pendapatan Non Operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber lain di luar kegiatan utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non operasional, sering juga disebut dengan pendapatan lain-lain.

Pengakuan Pendapatan

Pengakuan (*recognition*) berarti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi, yaitu

1. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Belkaoui dikutip dalam Asri (2016 : 105) menyatakan bahwa ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

1. *Accrual basis*, suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas diterima atau dibayar.
2. *Cash basis*, yaitu pendapatan diakui ketika kas telah diterima artinya perusahaan mencatat pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2019 : 2.23), beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.

Jenis Beban

Beban biasanya dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Beban Usaha. Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Beban usaha terbagi atas 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum.
2. Beban Diluar Usaha. Beban diluar usaha adalah beban-beban yang digunakan untuk kegiatan lain diluar aktivitas pokok atau utama perusahaan.

Pengakuan Beban

Beban baru dapat dilaporkan dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat masa yang akan datang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dalam perusahaan dan dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atau dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dengan proses penghasilan tertentu yang diperlukan perusahaan sehingga dengan demikian dapat

dilakukan matching antara pendapatan dan biaya yang dibebankan pada periode yang bersangkutan. Menurut Belkaoui dikutip dalam Asri (2016 : 105) menyatakan bahwa ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

1. *Accrual basis*, suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas dibayar.
2. *Cash basis*, yaitu perusahaan mencatat beban didalam transaksi jurnal *entry* ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. SAK ETAP dikeluarkan tanggal 17 Juli 2009. Penerapan efektif penyusunan laporan keuangan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK ETAP muncul sebagai solusi bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mampu menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit, serta mendapat opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk pengembangan usaha.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan proses akhir dari siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan dapat menjadi alat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (2015), laporan keuangan yang terdiri atas :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan baik aset, liabilitas dan ekuitas pada suatu periode. Neraca menjelaskan sumber-sumber ekonomi perusahaan (aset) dan juga menjelaskan di sektor mana sumber ekonomi dan penghasilan tersebut diinvestasikan pada saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode. Kinerja keuangan merupakan hubungan antara pendapatan dan beban. Laporan laba rugi menunjukkan sumber dari mana penghasilan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Arsani dan Putra tahun 2013, tentang Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP Dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera menyatakan bahwa perbedaan perlakuan terhadap pendapatan tersebut akan

berdampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan yaitu selisih hasil usaha menurut koperasi lebih rendah daripada selisih hasil usaha menurut perhitungan sesuai SAK ETAP.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan pengakuan pendapatan dan beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dilakukan, yaitu pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Kantor Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jl. Sam Ratulangi No. 35, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan November tahun 2018 sampai dengan Maret tahun 2019.

Prosedur Penelitian

Mengidentifikasi masalah, menentukan objek penelitian, penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data, menganalisis dan mengolah data, hasil penelitian, membuat kesimpulan dan memberikan saran.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara mengenai masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengakuan Pendapatan Pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sumber-sumber pendapatan pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Simpan Pinjam

Pendapatan Simpan Pinjam adalah pendapatan yang bersumber dari bunga atas pinjaman uang yang dilakukan oleh anggota koperasi. Bunga atas pinjaman pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah 5% per bulan. Jumlah peminjam pada tahun 2017 sebanyak 443 orang. Jumlah pendapatan simpan pinjam tahun 2017 sebesar Rp. 253.505.859. Pada saat anggota membayar bunga atas pinjaman yang diberikan, koperasi mencatatnya pada buku pembantu kas.

2. Pendapatan Sewa Kamar dan Penjualan Ruko

Pendapatan sewa bersumber dari usaha sewa kamar ruko oleh KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari bulan Januari – Mei 2017. Jumlah pendapatan sewa ruko KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Rp. 41.000.000. Setiap uang yang dibayarkan pengguna kamar sebagai timbal balik atas jasa yang telah diberikan koperasi akan diakui sebagai pendapatan. Koperasi akan mencatat pendapatan sewa pada saat pengguna kamar telah membayar sewa kamar tersebut.

Ruko yang telah disewakan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2017 kemudian dijual oleh koperasi pada bulan Mei 2017. Pendapatan penjualan ruko oleh KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibayar secara mencicil dari bulan Mei – Desember 2017.

Tabel 1. Pencatatan Pendapatan KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	Ket.
20 Jan	Pendapatan sewa ruko bulan Januari	10.000.000	Pendapatan dicatat saat pengurus menerima penyeteroran sewa ruko
1 Mar	Pendapatan sewa ruko bulan Februari	5.000.000	Pendapatan dicatat saat pengurus menerima penyeteroran sewa ruko
7 Mar	Pendapatan sewa ruko bulan Februari	3.000.000	Pendapatan dicatat saat pengurus menerima penyeteroran sewa ruko
23 Mar	Pendapatan sewa ruko bulan Maret	8,000.000	Pendapatan dicatat saat pengurus menerima penyeteroran sewa ruko
1 Mei	Pendapatan simpan pinjam	150.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pemberian pinjaman Rp. 3.000.0000 x 5%
3 Mei	Pendapatan simpan pinjam	500.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pemberian pinjaman Rp. 10.000.0000 x 5%
17 Mei	Pendapatan simpan pinjam	200.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pemberian pinjaman Rp. 4.000.000 x 5%
18 Mei	Pendapatan simpan pinjam	250.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pemberian pinjaman Rp. 5.000.000 x 5%
23 Mei	Pendapatan penjualan ruko	50.000.000	Panjar 1 pembayaran penjualan ruko
24 Mei	Pendapatan simpan pinjam	90.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pinjaman Rp. 1.800.000 x 5%
30 Mei	Pendapatan penjualan ruko	2.000.000.000	Panjar 2 pembayaran penjualan ruko
5 Juni	Pendapatan simpan pinjam	300.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pemberian pinjaman Rp. 1.800.000 x 5%
6 Juni	Pendapatan simpan pinjam	600.000	Bunga 2 bulan Rp. 6.000.000 x 5% x 2
6 Juni	Pendapatan simpan pinjam	150.000	Pendapatan bunga dipotong dan diterima langsung oleh koperasi saat pemberian pinjaman Rp. 3.000.000 x 5%
6 Juni	Pendapatan simpan pinjam	500.000	Bunga 2 bulan Rp. 5.000.000 x 5% x 2
6 Juni	Pendapatan simpan pinjam	600.000	Bunga 2 bulan Rp. 6.000.000 x 5% x 2

Sumber : KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengakui pendapatan simpan pinjam, pendapatan sewa ruko dan penjualan ruko berdasarkan basis kas, yaitu koperasi mengakui pendapatan setiap kali kas atau setara kas telah diterima.

Pengakuan Beban Pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Beban-beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas beban operasional serta beban administrasi dan umum. Beban operasional terdiri atas, beban pelunasan pada Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), beban bunga bank, beban bunga simpanan pihak ketiga, beban jasa kemitraan Bank SulutGo, beban upah tagih, beban PAM Ruko, Beban upah ongkos, cetak kwitansi, beban Alat Tulis Kantor(ATK), fotocopy, transportasi operasional, beli meterai, dan beli buku cek.

Beban administrasi dan umum pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas

biaya gaji, beban kesejahteraan, beban konsumsi kantor, beban rapat pengurus/pengawas/staf, beban pengembalian lebih tagih, kirim berkas, beban perbaikan alat kantor, beban perlengkapan ruko, beban perlengkapan kantor, beban lembur, beban appraisal, beban keamanan, beban wartawan, beban perlengkapan ruko, beban sedot wc ruko, beban iuran ruko, beban listrik, beban pengembalian panjar ruko, beban broker/panjar komisi, beban pembangunan ruko, beban urus AJB, beban pajak penjualan ruko dan beban lain-lain.

Tabel 2. Pencatatan Beban KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	Ket.
11 Jan	Biaya FC sertifikat	18.000	Koperasi mencatat beban saat kas dikeluarkan
16 Jan	Biaya beli meterai	22.500	Koperasi mencatat beban saat kas dikeluarkan
16 Jan	Biaya rapat pengurus, pengawas, staf	1.700.000	Koperasi mencatat beban saat kas dikeluarkan
19 Jan	Biaya perlengkapan kantor	81.100	Koperasi mencatat beban saat kas dikeluarkan
20 Jan	Biaya gaji	3.500.000	Gaji 3 pegawai
31 Jan	Biaya perlengkapan ruko	527.000	Koperasi mencatat beban saat kas dikeluarkan
31 Jan	Biaya penyedotan WC ruko	750.000	Koperasi mencatat beban saat kas dikeluarkan
15 Feb	Biaya PAM ruko	547.000	Biaya PAM ruko bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017
15 Feb	Biaya listrik ruko	1.778.000	Biaya listrik ruko bulan Januari dan Februari 2017
21 Mar	Pelunasan ke BKE	28.605.000	Pelunasan ke BKE bulan Maret 2017
16 Mei	Biaya gaji	3.500.000	Gaji 1 pengurus
30 Mei	Pelunasan ke BKE	1.626.220.000	Setoran pelunasan ke BKE

Sumber : KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2017

Berdasarkan tabel diatas, pengakuan beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode basis kas, yaitu beban diakui pada saat kas atau setara kas telah dibayarkan. Koperasi mengakui semua pengeluaran kas dan setara kas sebagai beban.

Pembahasan

Analisis Pengakuan Pendapatan Pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian, KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengakui pendapatan pada saat koperasi telah menerima kas atau setara kas. Dengan kata lain KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode *cash basis*. Berikut merupakan perbandingan antara kriteria pengakuan pendapatan berdasarkan SAK ETAP dengan pengakuan pendapatan yang diterapkan pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3. Perbandingan kriteria pengakuan pendapatan antara SAK ETAP dengan KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian SAK ETAP	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Pendapatan Bunga			
1.	Bunga harus diakui secara akrual	Koperasi mengakui pendapatan bunga pada saat anggota telah membayar bunga kepada koperasi.	Pernyataan ini tidak sesuai.

Pendapatan Sewa

- | | | | |
|----|---|---|------------------------|
| 1. | Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; | Koperasi menerima manfaat dari aktivitas penyewaan ruko, yaitu pemasukan kas dan kenaikan pendapatan. | Pernyataan ini sesuai. |
| 2. | Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. | Pihak koperasi mengetahui dengan pasti jumlah nilai atau biaya dari pendapatan sewa ruko. | Pernyataan ini sesuai. |

Penjualan Ruko

- | | | | |
|----|---|--|------------------------|
| 1. | Entitas telah mengalihkan resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli | Koperasi telah memindahkan semua resiko dan manfaat dari kepemilikan ruko kepada pembeli, seperti sudah tidak ada lagi pendapatan sewa ruko pada saat ruko telah dijual. | Pernyataan ini sesuai. |
| 2. | Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat di mana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual | Koperasi sudah tidak ada lagi keterlibatan dalam manajerial ruko tersebut. | Pernyataan ini sesuai. |
| 3. | Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal | Pendapatan yang diperoleh koperasi dari penjualan ruko dapat dihitung jumlahnya secara andal. | Pernyataan ini sesuai. |
| 4. | Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk kedalam entitas | Adanya manfaat ekonomi yang diperoleh koperasi dalam penjualan ruko, yaitu bertambahnya kas. | Pernyataan ini sesuai. |
| 5. | Biaya yang telah akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal | Biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi sehubungan dengan penjualan ruko dapat diukur dengan andal. | Pernyataan ini sesuai. |

Sumber: Data olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 3, pengakuan pendapatan simpan pinjam tidak sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan SAK ETAP. Menurut SAK ETAP pendapatan simpan pinjam (pendapatan bunga) harus diakui secara akrual yaitu pendapatan bunga diakui pada saat terjadi tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas telah diterima.

Pendapatan sewa kamar ruko terjadi pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2017. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengakui pendapatan sewa kamar ruko pada saat kas telah diterima oleh koperasi. Pengakuan pendapatan sewa ruko telah diakui sesuai dengan SAK ETAP karena telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.

KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjual ruko yang disewakan dan dibayar secara mencicil dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2017. Koperasi mencatat penjualan ruko setiap kali kas atau setara kas telah diterima koperasi, nilainya sebesar harga jual yang telah disepakati bersama antara pihak koperasi dan pembeli. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengakui penjualan ruko sesuai dengan SAK ETAP karena telah memenuhi kriteria-kriteria pendapatan.

Setelah melakukan pencatatan, pendapatan dimasukkan kedalam laporan keuangan yaitu Perhitungan Sisa Hasil Usaha yang akan dikurangi dengan beban-beban, sehingga menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Sisa hasil usaha dibagikan kepada setiap anggota sesuai dengan kontribusinya terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Analisis Pengakuan Beban Pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian, KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode *cash basis* untuk mengakui beban operasional serta beban administrasi dan umum, yaitu beban dicatat dan dilaporkan pada saat kas telah dibayarkan oleh koperasi. Koperasi mengakui semua pengeluaran kas dan

setara kas sebagai beban, sehingga muncul akun beban pelunasan pada Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE). Akun ini seharusnya tidak ada karena dari pada saat koperasi membayar pada BKE, kewajiban koperasi telah berkurang dan kas yang ada di koperasi juga berkurang. Akibatnya beban pada tahun 2017 menjadi lebih tinggi dari seharusnya sehingga laba atau sisa hasil usaha menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Berikut merupakan perbandingan antara kriteria pengakuan beban berdasarkan SAK ETAP dengan pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3. Perbandingan kriteria pengakuan beban antara SAK ETAP dengan KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian SAK ETAP	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1.	Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas;	Koperasi mengakui beban yang mengurangi kewajiban.	Pernyataan tidak sesuai.
2.	Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	Nilai beban yang ditanggung koperasi dapat dihitung jumlahnya dengan andal	Pernyataan ini sesuai.

Sumber: Data olahan, 2019

Beban yang telah diakui dan dicatat ini kemudian dimasukkan dalam laporan keuangan yakni laporan laba rugi. Beban ini dikurangkan pada pendapatan koperasi maka akan menghasilkan nilai sisa hasil usaha yang nantinya akan dibagikan pada anggota serta untuk pos-pos dana yang sudah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sumber-sumber pendapatan pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berasal dari pendapatan simpan pinjam, pendapatan sewa ruko dan penjualan ruko. Pengakuan pendapatan pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode *cash basis*. Pendapatan simpan pinjam yang berasal dari bunga pinjaman anggota diakui pada saat anggota kas diterima oleh koperasi. Pendapatan sewa ruko diakui pada saat kas telah dibayarkan oleh penyewa ruko. Pendapatan dari penjualan ruko diakui pada saat kas atau setara kas telah diterima oleh koperasi.
2. Beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 2 jenis yaitu beban operasional, serta beban administrasi dan umum. Beban operasional terdiri dari: beban Pelunasan pada Bank BKE Jakarta, Upah tagih, Bunga bank, PAM Ruko, Upah ongkos, Cetak kwitansi, ATK, Foto copy, Transportasi operasional, Beli meterai, Beli buku cek, Bunga simpanan pihak ketiga, dan Jasa kemitraan Bank SulutGo. Beban administrasi dan umum terdiri dari: Beban gaji, Beban kesejahteraan, konsumsi kantor, Rapat Pengurus/Pengawas/Staf, pengembalian lebih tagih, kirim berkas, perbaikan alat kantor, perlengkapan ruko, perlengkapan kantor, lembur, appraisal, keamanan, wartawan, RAT, perlengkapan ruko, sedot wc ruko, iuran ruko, listrik, pengembalian panjar ruko, broker/panjar komisi, biaya pembangunan ruko, urus AJB, pajak penjualan ruko, dan beban lain-lain. Pengakuan beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode *cash basis* dimana beban diakui pada saat kas telah dibayarkan oleh koperasi.
3. Pengakuan pendapatan simpan pinjam pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan SAK ETAP. Karena koperasi mengakui pendapatan simpan pinjam secara *cash basis* sedangkan dalam SAK ETAP pendapatan simpan pinjam harus diakui secara akrual. Pengakuan pendapatan sewa ruko dan penjualan ruko pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi kriteria pengakuan SAK ETAP.

4. Pengakuan beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan kriteria pengakuan beban SAK ETAP. Koperasi mengakui pelunasan pada Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) sebagai beban tidak sesuai dengan kriteria pengakuan beban SAK ETAP yaitu penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Koperasi KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya menggunakan metode acual basis dalam mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan SAK ETAP.
2. Diharapkan KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selalu berpedoman pada SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya.
3. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya menggunakan sistem dalam pencatatan karena akan lebih mempermudah pekerjaan sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, R. W. 2016. Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 23 Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Kawan. *Jurnal Riset Edisi V UNIBOS Makassar April 2016*. Vol 4, No. 008 (2016) : 101-113. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/59/54/&ved=2ahUKEwiuvPGeqNHjAhXn7nMBHQpBAQcQFjAAegOJARAB&usg=AOvVaw2e0uND0_pvrHcISDZq0CH8. Tanggal Akses : 4 April 2018
- Arsani, K. 2013. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP Dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 3.3 (2013):117-131. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5663>. Tanggal Akses : 24 April 2018
- Harahap, S. S. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Rada Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- _____. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. 2016. *Akuntansi Intermediate*. Erlangga, Jakarta.